LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

A. FORMAT SURAT KESANGGUPAN MEMBAYAR

SURAT KESANGGUPAN MEMBAYAR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (1)
NIP : ..... (1)
NIK : ..... (1)
Pangkat/Golongan : ..... (1)
Tempat, Tanggal Lahir : ..... (1)
Alamat : ..... (1)

Nomor dan Tanggal SK Pengangkatan sebagai Bendahara: ..... (1)

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali:

a. bahwa saya bertanggung jawab mengganti Kerugian Negara berdasarkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal pemerintah sebesar Rp..... (...*dengan huruf*...), yakni kerugian yang disebabkan: .....(2).....
b. bahwa pertanggungjawaban saya sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sesuai hasil pemeriksaan BPK.

Demikian Surat Kesanggupan Membayar ini saya buat secara sungguh-sungguh dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dalam kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Mengetahui,	……, ……. (3)
	(materai cukup)
(Aparat Internal Pengawasan Pemerintah) (4)	(Nama Bendahara)
Saksi-saksi	
Saksi I	Saksi II
(Nama Saksi I) (5)	(Nama Saksi II) (5)

Petunjuk Pengisian :

1. Diisi dengan identitas lengkap Bendahara yang menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Mengganti Kerugian Negara atau Surat Kesanggupan Membayar.
2. Diisi dengan jumlah Kerugian Negara yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan oleh Bendahara sehingga mengakibatkan terjadi Kerugian Negara.
3. Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Pernyataan Bersedia Mengganti Kerugian Negara atau Surat Kesanggupan Membayar ditandatangani.
4. Diisi dan ditandangani dengan nama ketua atau anggota tim aparat pengawas internal pemerintah.
5. Diisi dan ditandatangani dengan nama saksi dari pihak aparat pengawas internal pemerintah dan pihak satuan kerja.

B. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KE BPK ATAS KASUS KERUGIAN NEGARA

(Kop Surat dan Nama Instansi Satuan Kerja)

Tempat, Tanggal

Nomor : .....
Lampiran : ....
Perihal : .....

Kepada Yang Terhormat,
Anggota I BPK
Republik Indonesia
di
J A K A R T A

U.p. Yth. Kepala Direktorat Utama Binbangkum Pemeriksaan Keuangan Negera

Merujuk Laporan Hasil Pemeriksaan/Laporan Rapat Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Laporan Lainnya ..... perihal ....., dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. (penjelasan atas kasus Kerugian Negara) ...
2. (penjelasan atas kasus Kerugian Negara) ...
3. (penjelasan atas kasus Kerugian Negara) ...
4. Demikian pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Luar Negeri

Sekretaris Jenderal

(Nama dan Tanda Tangan)

Tembusan :

1. Yth. Menteri Luar Negeri (sebagai laporan);
2. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara I, BPK RI;
3. Yth. Inspektur Jenderal, Kementerian Luar Negeri;
4. Yth. Kepala Biro Keuangan, Kementerian Luar Negeri; dan
5. Yth. Inspektur Wilayah I/II/III/IV, Kementerian Luar Negeri.

Keterangan :

Surat Pemberitahuan ke BPK RI atas kasus Kerugian Negara disertai dengan data dukung sebagai berikut:

a. paling sedikit dengan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan/atau Barang;
b. Surat Keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan;
c. Surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
d. Surat keterangan Bank tentang saldo kas di bank bersangkutan (*Bank Statement*);
e. Salinan buku kas umum bulan bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
f. Surat laporan kepolisian dalam hal Kerugian Negara mengandung indikasi tindak pidana;
g. Berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal Kerugian Negara terjadi karena pencurian atau perampokan; dan/atau
h. Surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan.

C. FORMAT DAFTAR KERUGIAN NEGARA

Triwulan : .....
Tahun : .....
Kantor : .....

No	Nama Bendahara	No./Tgl SKTJM/SK Pembebanan Sementara/ SK Pembebanan	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	Jml. Kerugian Negara	Jml. Pembayaran/ Angsuran s.d. Bulan ... (Rp)	Sisa Kerugian (Rp)	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

....., ...
Kementerian Luar Negeri,

(.....)

Petunjuk Pengisian :

1. Diisi dengan nomor urut.
2. Diisi dengan nama Bendahara yang mengakibatkan terjadinya Kerugian Negara.
3. Diisi dengan No./Tgl. SKTJM/SK Pembebanan Sementara/SK Pembebanan (apabila ada).
4. Diisi dengan uraian kasus/tahun kejadian.
5. Diisi dengan jumlah Kerugian Negara (dalam rupiah).
6. Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima oleh Kementerian Luar Negeri dari Bendahara.
7. Disi dengan jumlah kolom 5 dikurangi kolom 6.
8. Diisi dengan jenis dan jumlah barang jaminan (apabila ada).
9. Diisi dengan :
   a. Pelaksanaan SKTJM, misal lunas tunai atau melalui penjualan barang;

b. Pelaksanaan SK Pembebanan Sementara, misal telah/belum dilaksanakan Sita Jaminan; atau
c. Pelaksanaan SK Pembebanan, misal tunai atau penyitaaan dan penjualan barang.

D. FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (1)

NIP : ..... (1)

NIK : ..... (1)

Pangkat/Golongan : ..... (1)

Tempat, Tanggal Lahir : ..... (1)

Alamat : ..... (1)

Nomor dan Tanggal SK Pengangkatan sebagai Bendahara: ..... (1)

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp..... (...*dengan huruf*...), yakni kerugian yang disebabkan: .....(2).....

Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Negara di .....(3).... dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak saya menandatangani SKTJM ini.

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

1. ..... (4)
2. ..... (4)
3. ..... (4)

Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Mengetahui ....., ... (5)

(materai cukup)

Kepala ..... (6)..... (Satuan Kerja) (Nama Bendahara)

Saksi-saksi:
1. ..... (7)
2. ..... (7)

Petunjuk Pengisian :

1. Diisi dengan identitas lengkap Bendahara yang menandatangani SKTJM.
2. Diisi dengan jumlah Kerugian Negara yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan oleh Bendahara sehingga mengakibatkan terjadi Kerugian Negara.
3. Diisi dengan tempat Kantor Kas Negara dimana uang tersebut akan disetorkan.
4. Diisi dengan barang-barang milik Bendahara yang dijadikan jaminan atas pelunasan Kerugian Negara.
5. Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani.
6. Diisi dengan nama satuan kerja yang bersangkutan dan ditandatangani oleh kepala satuan kerja.
7. Diisi dengan nama dua orang saksi dari Pemeriksa BPK atau lingkungan instansi yang bersangkutan yang ikut menyaksikan penandatanganan SKTJM ini.

E. FORMAT SURAT PENYERAHAN JAMINAN

SURAT PENYERAHAN JAMINAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (1)
NIP : ..... (1)
NIK : ..... (1)
NPWP : ..... (1)
Jabatan : ..... (1)
Unit Kerja : ..... (1)
Alamat : ..... (1)
Nomor Telepon : ..... (1)

dengan ini menyatakan:

1. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang saya buat tanggal .....(2), dengan ini saya menyerahkan barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan berupa:
   a. Tanah (sebutkan status Hak Milik/Adat/HGB, luas, lokasi, bukti pemilikan, dan lain-lain);
   b. Bangunan (sebutkan permanen, semi permanen, luas, lokasi/alamat, bukti IMB, dan lain-lain);
   c. Barang bergerak (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan, dan lain-lain);
   d. Tagihan Piutang (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan, dan lain-lain);
   e. Surat-surat Berharga (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan, dan lain-lain),

   sebagai jaminan atas pengembalian Kerugian Negara yang menjadi tanggung jawab saya sebesar Rp.....(3).... (...*sebutkan dengan huruf*...).).
2. Bahwa barang-barang, hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan tersebut telah saya serahkan kepada negara yang dalam hal ini diwakili oleh:

   Nama : ..... (4)
   NIP : ..... (4)
   NIK : ..... (4)
   Jabatan : ..... (4)

Unit Kerja : ..... (4)
Pangkat/Gol. : ..... (4)
Nomor Telepon : ..... (4)

Dengan disaksikan oleh:

Nama	:	..... (5)
NIP	:	..... (5)
NIK	:	..... (5)
Pangkat/Golongan	:	..... (5)
Jabatan	:	..... (5)
Unit Kerja	:	..... (5)

Nama	:	..... (6)
NIP	:	..... (6)
NIK	:	..... (6)
Pangkat/Golongan	:	..... (6)
Jabatan	:	..... (6)
Unit Kerja	:	..... (6)

3. Menjamin bahwa barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, adalah benar-benar milik/hak saya pribadi yang sah serta tidak dalam keadaan sengketa dan tidak terdapat beban-beban lainnya.
4. Apabila sampai dengan tanggal ..... ternyata saya tidak mampu mengembalikan seluruh Kerugian Negara seluruhnya, maka barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, saya serahkan sepenuhnya kepada negara untuk dijual, dilelang, ditagih ataupun diterima guna penyelesaian kewajiban saya untuk bertanggunjawab atas Kerugian Negara dimaksud.
5. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas ternyata kurang dari jumlah Kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kekurangan tetap menjadi tanggung jawab saya atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris saya.
6. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas melebihi jumlah kekurangan Kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kelebihannya akan saya atau Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ahli Waris saya terima kembali setelah dipotong biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh negara sehubungan dengan penjualan/pelelangan.

7. Bahwa dengan pencairan jaminan atas Kerugian Negara ini tidak mengenyampingkan tindakan hukum pihak yang berwajib dan/atau tindakan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian penyerahan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar, dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Tempat, Tanggal

.....

Yang menerima penyerahan Jaminan,	Yang Menyerahkan,
	(materai cukup)
.....	.....
NIP.	NIP. .....

Saksi-saksi,

1. .....
2. .....

Petunjuk Pengisian :

*) Sebutkan jaminan yang diserahkan

1. Diisi dengan identitas lengkap Bendahara yang menandatangani Surat Penyerahan Jaminan.
2. Diisi dengan tanggal SKTJM.
3. Diisi dengan jumlah Kerugian Negara yang terjadi dalam angka dan huruf.
4. Diisi dengan identitas pihak yang menerima penyerahan barang jaminan bagi penyelesaian Kerugian Negara.
5. Diisi dengan identitas Saksi I atas penyerahan barang jaminan bagi

penyelesaian Kerugian Negara.

6. Diisi dengan identitas Saksi II atas penyerahan barang jaminan bagi penyelesaian Kerugian Negara.

F. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN SEMENTARA

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ..... (1)

TENTANG
PEMBEBANAN SEMENTARA ATAS KERUGIAN NEGARA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. ..... (2)
b. ..... (2)
Mengingat : 1. ..... (3)
2. ..... (3)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PEMBEBANAN SEMENTARA ATAS KERUGIAN NEGARA.

KESATU : Pegawai Negeri Sipil di bawah ini:
Nama : ..... (4)
NIP : ..... (4)
Pangkat/Gol. : ..... (4)
Jabatan : ..... (4)
Unit Kerja : ..... (4)
dibebankan kewajiban untuk mengganti Kerugian Negara sebesar .....(5)... (....dengan huruf.....) atas kerugian negara yang disebabkan ....(6)....

KEDUA : Menugaskan kepada Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara untuk menagih dan meminta kepada Saudara ....(7).... agar menyetor ke Kas Negara sejumlah Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di ..... (8)
Pada tanggal ..... (9)
MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

(Nama Pejabat)

Tembusan:
1. Ketua BPK;
2. ..... (10)
3. Yang Bersangkutan.

Petunjuk Pengisian :

1. Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkan keputusan ini.
3. Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum penerbitan keputusan yang tingkatnya sama atau lebih tinggi.
4. Diisi dengan identitas Bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang menjadi penanggungjawab Kerugian Negara.
5. Diisi dengan jumlah Kerugian Negara dalam angka dan huruf.
6. Diisi dengan perbuatan yang dilakukan oleh Bendahara sehingga mengakibatkan terjadi Kerugian Negara.
7. Diisi dengan nama Bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang menjadi penanggungjawab Kerugian Negara
8. Diisi dengan tempat keputusan ditetapkan.
9. Diisi dengan tanggal keputusan ditetapkan.
10. Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini.

G. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGGANTI KERUGIAN NEGARA

SURAT PENYATAAN BERSEDIA MENGGANTI KERUGIAN NEGARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (1)
NIK : ..... (1)
Tempat, Tanggal Lahir : ..... (1)
Pekerjaan : ..... (1)
Alamat : ..... (1)
Nomor Telepon : ..... (1)

Sebagai pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dari :

Nama : ..... (2)
NIP : ..... (2)
Pangkat/Gol. : ..... (2)
Jabatan : ..... (2)
Unit Kerja : ..... (2)

Nomor dan Tanggal SK Pengangkatan sebagai Bendahara: ..... (3)

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab dengan bersedia mengganti Kerugian Negara atas Kerugian Negara sebesar Rp....(4).... (...*dengan huruf*...), yakni kerugian yang disebabkan: ....(5).....

Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Negara di .....(6).... dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak saya menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Mengganti Kerugian Negara ini.

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

1. ..... (7)
2. ..... (7)
3. ..... (7)

Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari setelah saya

menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut maka negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Demikian Surat Pernyataan Bersedia Mengganti Kerugian Negara ini saya buat secara sungguh-sungguh dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dalam kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Mengetahui ……, …… (8)

(materai cukup)

(TPKN) (Nama pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris)

Saksi-saksi

Saksi I Saksi II

(Nama Saksi I) (Nama Saksi II)

Petunjuk Pengisian :

1. Diisi dengan identitas lengkap pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Negara.
2. Diisi dengan identitas lengkap Bendahara yang menimbulkan Kerugian Negara.
3. Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Keputusan Pengangkatan Bendahara yang menimbulkan Kerugian Negara.
4. Diisi dengan jumlah Kerugian Negara yang terjadi dalam angka dan huruf.
5. Diisi dengan perbuatan yang dilakukan oleh Bendahara sehingga mengakibatkan terjadi Kerugian Negara.
6. Diisi dengan tempat Kantor Kas Negara dimana uang tersebut akan disetorkan.
7. Diisi dengan barang-barang milik pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang dijadikan jaminan atas pelunasan Kerugian Negara.

8. Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Pernyataan Bersedia mengganti Kerugian Negara ditandatangani.

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d

RETNO L. P. MARSUDI